



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: PKB dan Hanura Dorong Kocok Ulang Pimpinan Dewan
Tanggal	: Selasa, 18 April 2017
Surat Kabar	: Koran Tempo
Halaman	: 7

## PKB DAN HANURA DORONG KOCOK ULANG PIMPINAN DEWAN

PDI Perjuangan disebut bisa menjadi Ketua DPR.

Hussein Abri Dongoran  
Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Ide perombakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menguat dalam rapat panning kerja pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3). Dua fraksi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura, mengajukan usul itu setelah rapat perdana bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Anggota Badan Legislasi dari PKB, Lukman Eddy, mengatakan peluang kocok ulang itu terbuka lebar karena beleid perubahan dalam revisi tidak sejalan dengan batang tubuh aturan. "Ini membuka peluang kocok ulang," ujar dia di DPR kemarin. Aturan perubahan yang dimaksudkan, Lukman melanjutkan, adalah Pasal 84 ayat 1 revisi UU MD3. Dalam beleid sebelumnya, pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Ayat kedua, pimpinan ditentukan dalam satu paket. Sedangkan dalam revisi, posisi wakil berubah menjadi lima dan penentuannya tetap menggunakan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

kan paket. Porsi pimpinan ini ditujukan untuk PDI Perjuangan.

Selain itu, ucapan dia, dalam Pasal 427 huruf a dan b yang terdapat dalam revisi juga terbuka peluang kocok ulang. Beleid tersebut mengatur bahwa, dalam revisi, pimpinan DPR dan MPR memiliki periode keanggotaan yang tetap dan berasal dari pemilihan pemilu. "Kalau enggak setuju, ya, bisa

kocok ulang."

Gagasan merevisi UU MD3 mencuat setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR menggantikan rekan satunya, Ade Komaruddin, akhir November tahun lalu. Perubahan itu dibutuhkan sebagai salah satu syarat yang diajukan Golkar agar pertemuan Setya disetujui Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan. Setelah berlarut-larut, akhirnya pembahasan dimulai kemarin dalam panitia kerja.

Selain tambahan kursi pimpinan DPR, Dewan ingin merevisi Pasal 15 tentang komposisi pimpinan MPR dari sebelumnya lima kursi menjadi enam kursi.

Sedangkan Pasal 121 mengatur ihwal penambahan kursi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Dewan juga ingin meng-

ubah Pasal 105 dan 164 tentang pengukuhan Badan Legislasi. Nantinya, Badan Legislasi bisa mengusulkan rancangan undang-undang. Selama ini, Baleg hanya berwenang melakukan harmonisasi legislasi terhadap usul komisi.

Kocok ulang itu bisa berarti pembuatan paket baru secara proporsional sesuai dengan pemenang pemilu 2014. Saat itu, partai yang menempati lima

peringkat suara terbaik adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB. "Implikasinya, PDI Perjuangan bisa jadi ketua, dan pimpinan bisa tetap lima atau menjadi tujuh," ujarnya.

Anggota Baleg dari Fraksi Hanura, Rufinus Hutauruk, juga setuju dengan pendapat Lukman. Menurut dia, kocok ulang pimpinan Dewan bisa membuat DPR lebih diperceaya masyarakat. "Ini semangat baru," ujarnya. Rufinus menampik kocok ulang akan menimbulkan kegaduhan.

Adapun Sekretaris Fraksi NasDem, Syarief Akadrie, mengatakan kocok ulang pimpinan bisa terjadi kalau ada perubahan menyeluruh UU MD3. "Apalagi ada wacana ingin mengeluarkan DPRD karena sudah diatur dalam peraturan daerah," katanya.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebago menampik adanya pembahasan kocok ulang pimpinan DPR. "Enggak ada. Final dan tegas," ujar politikus Golkar ini. Posisi Ketua DPR saat ini diisi Setya, yang merupakan Ketua Umum Golkar.

Menurut Firman, dinamika yang berkembang saat pembahasan adalah permintaan penambahan kursi DPR, MPR, selain untuk PDIP. Permasalahan ini pun akan dibawa ke tingkat pimpinan fraksi dan akan diputuskan dalam rapat paripurna pada Kamis mendatang.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Arief Wibowo mengatakan sekarang tidak mungkin terjadi kocok ulang. Sebab, kata dia, sudah ada kesepakatan bahwa tambahan pimpinan DPR dan MPR akan diberikan ke PDI Perjuangan. "Enggak bisa kocok ulang," ujarnya. ●